



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

# **I N S P E K T O R A T**

Parik Malintang Kecamatan Anam Lingsuang Kode Pos 25584

Telepon. (0751) 4784555, Faksimile. 4784554 Pos El: [sekda@padangpariamankab.go.id](mailto:sekda@padangpariamankab.go.id)

Situs Web: <http://padangpariamankab.go.id>

## **LAPORAN MONITORING DAN PENDAMPINGAN PENGISIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) BAGI WAJIB LAPOR TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NOMOR : LHP/ 26 /Insp/2021

TANGGAL : 26 Februari 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**INSPEKTORAT**  
**PARIT MALINTANG KECAMATAN ENAM LINGKUNG**  
Telp/Fax : (0751) 697283, Email : [inspektorat@padangpariamankab.go.id](mailto:inspektorat@padangpariamankab.go.id)

---

Nomor : LHP / / Insp / 2021

Lampiran : -

Perihal : Laporan Monitoring dan Pendampingan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi wajib Laporan Tahun 2020

Parit Malintang, Februari 2021

Kepada Yth.

Bapak Bupati Padang Pariaman

Di -

Parit Malintang

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 700/ 10 /Insp-SP/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang dinas dalam rangka melakukan monitoring dan pendampingan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi wajib lapor tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman.

Kami telah melakukan monitoring dan pendampingan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi wajib lapor tahun 2020 pada OPD-OPD dan Kecamatan, hasil monitoring dan pendampingan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi wajib lapor tahun 2020 dapat kami uraikan sebagai berikut :

**A. Tujuan monitoring dan pendampingan**

Tujuan monitoring dan pendampingan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi wajib lapor tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pendampingan dalam penginputan data-data pribadi bagi WL yang awal menjabat
- b. Memastikan data keluarga telah diinput sesuai dengan daftar yang ada pada kartu keluarga.
- c. Melakukan pendampingan dalam penginputan daftar harta sesuai dengan data yang ada pada penyelenggara negara.
- d. Melakukan penginputan pada daftar penerimaan, pengeluaran sesuai dengan data yang diberikan oleh penyelenggara negara.
- e. Memberikan saran kepada penyelenggara negara bagi yang belum membawa data-data pribadi untuk segera dalam pelaporan.

## B. Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengawasan

Ruang lingkup monitoring dan pendampingan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah bagi wajib lapor tahun 2020.

## C. Pelaksanaan Monitoring dan pendampingan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi wajib lapor tahun 2020.

Monitoring dan pendampingan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi wajib lapor tahun 2020 dilakukan pada seluruh OPD dan Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman.

### Capaian Tingkat Kepatuhan Per OPD Wajib Lapor Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

No	UnitKerja	PN/WL Online	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Tepat Waktu	Terlambat	Belum Lapor	Kepatuhan (%)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5	5	5	5	0	0	100,00%
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5	5	5	5	0	0	100,00%
3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	4	4	4	4	0	0	100,00%
4	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5	5	5	5	0	0	100,00%
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6	6	6	6	0	0	100,00%
6	DINAS KESEHATAN	6	6	6	6	0	0	100,00%
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6	6	6	6	0	0	100,00%
8	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	6	6	6	6	0	0	100,00%
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6	6	6	6	0	0	100,00%
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	5	5	5	0	0	100,00%

No	UnitKerja	PN/WL Online	Wajib Laport	Sudah Laport	Tepat Waktu	Terlambat	Belum Laport	Kepatuhan (%)
11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6	6	6	6	0	0	100,00%
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6	6	6	6	0	0	100,00%
13	DINAS PERHUBUNGAN	4	4	4	4	0	0	100,00%
14	DINAS PERIKANAN	5	5	5	5	0	0	100,00%
15	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	5	5	5	5	0	0	100,00%
16	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	6	6	6	6	0	0	100,00%
17	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	7	7	7	0	0	100,00%
18	INSPEKTORAT DAERAH	29	29	29	29	0	0	100,00%
19	KECAMATAN	31	31	31	31	0	0	100,00%
20	PIMPINAN TERTINGGI	1	1	1	1	0	0	100,00%
21	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	4	4	4	4	0	0	100,00%
22	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6	6	6	6	0	0	100,00%
23	SEKRETARIAT DAERAH	15	15	15	15	0	0	100,00%
24	SEKRETARIAT DPRD	4	4	4	4	0	0	100,00%
25	WAKIL PIMPINAN	1	1	1	1	0	0	100,00%
26	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	2	2	2	2	0	0	100,00%
27	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5	5	5	5	0	0	100,00%
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN	6	6	6	6	0	0	100,00%

No	UnitKerja	PN/WL Online	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Tepat Waktu	Terlambat	Belum Lapor	Kepatuhan (%)
	PERTANAHAN							
29	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	6	6	6	6	0	0	100,00%
30	DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	5	5	5	5	0	0	100,00%
31	RSUD PADANG PARIAMAN	1	1	1	1	0	0	100,00%
	<b>Jumlah Total</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>209</b>			<b>100,00%</b>

#### D. Uraian dan Simpulan Hasil Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan hasil Monitoring dan pendampingan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi wajib lapor tahun 2020 dapat dilaporkan bahwa dari Jumlah Wajib Lapor Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 sebanyak 209, yang terdiri dari Pejabat Eselon II, III dan Pejabat Fungsional di Inspektorat sudah berhasil di input kedalam Sistem LHKPN dengan hasil capaian 100% per tanggal 11 Februari 2021, namun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan monitoring dan pendampingan pengisian Harta Kekayaan Penyelenggara Negara oleh Tim Inspektorat ke OPD-OPD dan Kecamatan di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

1. Wajib Lapor lupa password email
2. Wajib Lapor telah membuka web LHKPN namun lupa password saat mengaktivasi .
3. Wajib Lapor tidak membawa bahan-bahan yang dibutuhkan untuk penginputan.
4. Wajib Lapor masih belum paham tentang cara penginputan data kekayaan.
5. Wajib Lapor masih belum disiplin tentang jadwal pelaporan dari harta kekayaan .
6. Wajib Lapor masih banyak yang belum mengirimkan bukti fisik Surat Kuasa yang sudah ditanda tangani oleh Wajib Lapor dan Anggota Keluarga

#### E. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan hasil Monitoring dan pendampingan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi wajib lapor tahun 2020

bahwa dapat direkomendasikan agar membentuk admin unit kerja unit kerja dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mana masing-masing unit kerja mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Aktivasi akun wajib lapor ( WL )
2. Pemutahiran data wajib lapor dan Non Wajib Lapor ( WL dan Non WL )
3. Memfalisitasi Wajib Lapor ( WL ) yang mengalami kendala tekhnis dalam penginputan data

Demikian Laporan Hasil Monitoring dan pendampingan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi wajib lapor tahun 2020 ini disampaikan kepada Bapak sebagai bahan informasi dan dapat dipergunakan seperlunya, Terima kasih.

Diketahui :

Tim,

INSPEKTUR KABUPATEN



HENDRA ASWARA, SSTP.MM

Pembina Tk I Nip. 19810926 199912 1 001

1. Trisna Dewi Busti, S.Si.Apt.MM (  )  
Pengendali Teknis
2. Budi Maisal Putra, ST (  )  
Ketua Tim
3. Fauzan, SAP.M.Si (  )  
Anggota Tim
4. Neni Emilda, SKM.MM (  )  
Anggota Tim
5. Nurpen Heriandes, ST ( )  
Anggota Tim